

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN ETIKA SUKARELA DAN IMPLIKASI TERHADAP HARGA SAHAM

Herry Laksito *)

Abstract

The objectives of this paper is to investigate the impact of audit committee characteristics on voluntary ethics disclosure and its implications on stock price. Independent variable in this paper is measured using four elements of audit committee characteristics consist of competency, the number of meeting, scope, tenure and multiple directorships. On the other hand this paper uses the stock price as dependent variable and voluntary ethical disclosure as mediating variable. The population in this paper are all companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018. Sample selection method using purposive sampling and the number of samples attained as many as 94 companies. This analysis used in this paper is a multiple regression analysis. The results of this study show that the number of meeting and multiple directorship were significantly associated with the voluntary ethics disclosure, while competency, size and tenure were not significantly associated with the voluntary ethics disclosure. The study also found a positive and significant effect between voluntary ethical disclosure and company stock prices.

Keywords : Competency, the number of meeting, scope, tenure, multiple directorships, audit committee, voluntary ethics disclosure, stock prices.

Pendahuluan

Instrumen investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh investor saat ini adalah berinvestasi di pasar saham. Saham tidak hanya merupakan jenis investasi yang populer, namun diyakini mampu mendatangkan keuntungan atau *return* serta mudah untuk

*) *Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*

diperjualbelikan. Ragam keuntungan yang diharapkan investor dapat berupa dividen yang dibagikan ataupun dari selisih harga jual saham dikurangi dengan harga belinya. pergerakan naik turunnya harga saham inilah yang biasanya mencuri perhatian investor dan menjadi salah satu *predictor* keuntungan atau kerugian dalam berinvestasi. sehingga tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa harga saham merupakan sebuah indikasi tentang prospek sebuah perusahaan.

Di lain sisi bagi perusahaan *go public*, harga saham seringkali dihubungkan dengan ukuran keberhasilan kinerja manajemen. Ketika manajemen mampu mempertahankan harga saham di level yang tinggi maka secara otomatis kepercayaan pemodal atau calon pemodal akan beranjak naik dan berdampak pada kredibilitas perusahaan. Sebaliknya, jika harga saham mengalami penurunan terus-menerus maka hal ini menjadi pertarungan pula kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu berbagai upaya pasti akan dilakukan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan harga saham. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengungkapan informasi yang transparan baik melalui laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan merupakan media komunikasi terutama berisi informasi penting dan dikemas secara menarik dengan harapan dapat mempengaruhi perilaku pemodal dan calon pemodal dalam kaitan dengan pengambilan keputusan investasi.

Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan investasi adalah mutu pengungkapan laporan tahunan yang diterbitkan oleh suatu entitas. Diperlukan kualitas pengungkapan yang cukup dengan harapan mampu menyediakan informasi yang tidak memicu kekeliruan interpretasi (sembiring, 2012). Pengungkapan (*disclosure*) mengandung arti penyediaan informasi (*the release of information*), hendriksen & breda (2002) menyatakan bahwa , agar tercapai pasar yang efisien diperlukan pengungkapan pada laporan tahunan. Sementara wijaya (2009) mengemukakan bahwa relevansi informasi merupakan factor penting dalam sebuah keputusan ekonomis. Tujuan tersebut akan tercapai manakala tersedia informasi tambahan selain yang sudah diwajibkan. Hal ini sejalan dengan sembiring (2012) berpendapat bahwa terdapat dua jenis pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan tahunan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib memuat pengungkapan minimal yang diharuskan oleh standar akuntansi serta tercantum pada peraturan ojk nomor 29/pojk.04/2016 sementara di lain sisi pengungkapan sukarela adalah pengungkapan tambahan diluar konten yang diwajibkan. (qu et al., 2012)

Salah satu contoh pengungkapan sukarela yang saat ini mulai populer dilakukan adalah pengungkapan yang berhubungan dengan etika. Jenis pengungkapan ini lebih berfungsi untuk peningkatan governance perusahaan mereka (sullivan dan shkolkov, 2006). Pengungkapan etika menjadi sangat penting karena diharapkan menjadi pondasi penting agar proses usaha berada dalam koridor hukum dan kode etik yang ada. Bukti empiris menunjukkan terdapat beberapa perusahaan seperti enron, worldcom dan parmalat yang akhirnya mengabaikan nilai nilai etika demi mengejar keuntungan atau memenangkan persaingan (muhammad, shahimi, yahya dan mahzan, 2009).

Lefkowitz (2006:247), witmer (2001) menafsirkan bahwa seseorang dianggap melakukan pengabaian nilai nilai etika pada saat pilihan perilaku tersebut secara bisnis menguntungkan bagi diri sendiri atau orang lain namun dengan jalan melanggar aturan serta prinsip etika. Leone (2010) dan persons (2011) bahkan menyatakan terdapat pengaruh negatif pada kredibilitas perusahaan jika memilih mengedepankan perilaku tidak etis dalam mengejar keuntungan ekonomis semata. Dampak perilaku tidak etis , secara empiris dapat menghancurkan citra dan nama baik perusahaan; menurunkan kemampuan memperoleh laba dan harga saham; dan pada akhirnya menciptakan ketidakpercayaan publik. Friedman (2008) menambahkan baik aspek keuangan (*financial bailout*) maupun aspek etika (*ethical bailout*) adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam bisnis.

Kecenderungan perilaku tidak etis dapat diturunkan ke level yang lebih rendah jika *good corporate governance* dijalankan dengan benar. Lebih lanjut menurut wulandari (2015), implementasi *good corporate governance* yang handal mengharuskan hadirnya seperangkat aturan serta etika baku yang dibutuhkan. Salah satu organ tata kelola yang berpotensi menjamin keandalan informasi akuntansi adalah komite audit. Menurut purwati (2006) komite audit sebagai organ kelengkapan dewan komisaris memiliki fungsi utama dalam menjaga komitmen yang tinggi serta konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip corporate governance terutama aspek transparansi dan disclosure.

Komite audit adalah organ komisaris yang menjadi ujung tombak penegakan komitmen terhadap etika. Melalui mekanisme tata kelola perusahaan, komite audit bertindak untuk dan atas nama dewan komisaris bahwa praktik-praktik etis telah dijalankan dengan benar. Komite audit juga menjadi salah satu aktor utama dalam tata kelola perusahaan terutama berperan mendorong kepatuhan terhadap regulasi (abbott, parker dan peters, 2003). Melalui proses pengamatan kepada manajemen secara intens diharapkan komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap akselerasi pengungkapan etika di

perusahaan. Yuen, liu, zhang dan lu (2009) menyatakan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh cukup tinggi terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sementara forker (1992) menyatakan bahwa peningkatan mutu pengungkapan, system pengendalian intern serta penurunan biaya agensi, membutuhkan efektifitas pemantauan yang dilakukan komite audit.

Hussain alkda (2012) menemukan bahwa pemilihan personel komite audit yang memiliki kompetensi di bidang *accounting* dan *finance* serta ber integritas adalah tantangan yang dihadapi ketika peran utama komite belum bergeser yaitu memastikan mutu laporan keuangan. Penelitian terdahulu banyak memberi bukti bahwa karakteristik komite audit berpengaruh dalam tugas pengawasan dibanding sebatas penelitian mengenai keberadaan komite audit. (abbott dan parker, 2000; beasley, carcello, hermanson dan lapides, 2000; raghunandan, read dan rama, 2001; carcello dan neal 2003). Sementara hayek dan hayek (2012) menyatakan bahwa elemen komite audit berupa independensi; kompetensi dan pola kompensasi) memberi dampak terhadap kesadaran moral dari kecurangan penyusunan laporan keuangan. Penelitian akhtaruddin et al. (2009) menemukan bahwa komposisi jumlah komite audit independen dibanding jumlah anggota terbukti tidak berhubungan dengan level pengungkapan sukarela. Secara khusus, efektifitas kinerja komite membutuhkan kriteria personal yang memiliki independensi , mempunyai jumlah anggota yang ideal, intensitas jumlah pertemuan dan competency. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan etika serta implikasi terhadap harga.

Studi Pustaka

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi oleh Jansen dan Meckling (1976) didefinisikan sebagai sebuah perikatan antara satu atau beberapa orang *principal* yang memberikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengelola perusahaan terutama pengambilan keputusan strategis. Teori agensi mendeskripsikan secara jelas hubungan dua pihak yaitu peran sebagai agen dan peran menjadi prinsipal. Permasalahan klasik teori agensi adalah konflik keagenan yaitu adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal Seringkali terdapat kecenderungan bahwa kebijakan yang dibuat oleh agen tidak tepat guna bagi perusahaan dan jauh dari prinsip transparan terutama saat penyampaian laporan kinerjanya kepada prinsipal yang berujung pada pengelolaan perusahaan yang kurang efektif (Poluan dan Nugroho, 2015).

Mitigasi konflik dapat dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan komite audit dalam memoderasi perilaku tim manajemen dalam menentukan suatu keputusan. Optimalisasi peran komite audit sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik tersebut dan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan yang baik (Ainuddin dan Abdullah, 2001 dalam Rahmat et al., 2008). Apabila komite audit efektif dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan perilaku tidak etis atau melanggar peraturan dan kesepakatan yang ada, sehingga dapat memicu manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela yang menurut pertimbangannya merupakan *good news* yang dapat menarik perhatian investor.

Teori Sinyal (Signaling Theory)

Istilah sinyal memiliki makna sebuah tanda atau pesan yang disampaikan perusahaan kepada pihak terkait lainnya. Isyarat dapat diwujudkan dalam beragam cara dan bentuk, tujuan utama penyampaian tanda adalah mempengaruhi penerima tanda agar mempunyai informasi yang cukup dan relevan sehingga merubah cara pandang terhadap pemberi tanda. Hal ini memiliki makna bahwa sinyal terpilih harus memiliki muatan konten informasi berkualitas dan memiliki daya pengaruh tinggi untuk merubah penilaian pihak eksternal perusahaan (Syuhada, Yusnaini, & Meirawati, 2019).

Menurut Martono (2007) dalam Syuhada et al. (2019) menyebutkan bahwa asumsi dasar *signaling theory* adalah dengan mengamati sejumlah tanda yang melekat dan menggambarkan kondisi sebuah perusahaan. Alur pikir teori ini adalah perusahaan dengan kualitas baik secara otomatis akan memunculkan sinyal kepada pasar melalui tanda spesifik yang dimilikinya, sehingga pelaku pasar dapat dengan mudah membedakan karakteristik perusahaan dengan kualitas baik dan buruk (Syuhada et al., 2019). Teori sinyal membangun asumsi bahwa kekuatan konten informasi baik akuntansi maupun non akuntansi merupakan factor dominan pengambilan keputusan investasi.

Keterkaitan antara pengungkapan etika sukarela dan harga saham dapat dijelaskan dengan teori sinyal. Berdasarkan teori sinyal, harga saham dengan sedikit fluktuasi penurunan adalah sinyal positif bagi pemegang saham tetap menanamkan modalnya. Sedangkan bagi calon investor, hal ini memberikan sinyal untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Terdapat beragam cara manajemen untuk menarik kepercayaan investor, salah satu alternatif yang bisa dijalankan adalah memperluas pengungkapan

sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan wahana efektif agar tersedia diharapkan tersedia informasi relevan dan cukup dan diperlukan bagi stakeholder meskipun belum tersedia regulasi mengenai pengungkapannya. (Wardani, 2012).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) dinyatakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) sebagai pondasi utama sistem ekonomi pasar. *Good Corporate Governance* (GCG) bukan hanya sebuah *trust* bagi perusahaan yang menjalankannya namun berdampak pada kondisi usaha yang ada di sebuah negara. Keberhasilan monitoring bergantung kepada bagaimana mekanisme yang berjalan baik antara pihak-pihak yang terkait misalnya para pemegang saham, dewan komisaris perusahaan, kepemilikan manajerial, dan dewan direksi perusahaan. Terdapat empat elemen penting yang harus hadir dalam konsep *good corporate governance*, yaitu :

a. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan serta pertanggungjawaban, yang akan tercipta apabila perusahaan mampu menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan bisnis perusahaan. Elemen ini mengharuskan tersedianya informasi dengan konten cukup, berkualitas, memiliki nilai relevansi serta aksesibilitas tinggi serta mudah dimengerti oleh para stakeholder.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus diterapkan dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja dan keberlanjutan sebuah usaha. Konsep ini mengedepankan bahwa dalam sebuah bisnis diperlukan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang bersifat transparan serta wajar. Penerapan elemen ini berdampak pada peningkatan manajemen menjadi lebih bagus, dapat diukur, dan seiring dengan dengan kepentingan perusahaan, dengan tidak mengesampingkan kepentingan stakeholder.

c. *Tanggung Jawab (Responsibility)*

Elemen tanggung jawab bermakna bahwa perusahaan harus taat dan tunduk terhadap regulasi yang berlaku serta memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab menekankan terpeliharanya keberlanjutan usaha untuk rentang waktu panjang dan bermuara pada adanya *good corporate citizen*.

d. *Kewajaran (Fairness)*

Elemen kewajaran mengandung arti bahwa proses bisnis tetap harus mempertimbangkan berbagai kepentingan stakeholder secara wajar.

Mekanisme Good Corporate Governance

Di dalam praktik, mekanisme *good corporate governance* dapat dibedakan menjadi 2 kategori, pertama mekanisme internal dan kedua mekanisme eksternal. Mekanisme internal terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Sementara mekanisme eksternal meliputi pengendalian oleh pasar dan kepemilikan dari institusional sebagai pengendali (Anggariska, 2019):

a. Dewan Komisaris (*Board of Commissioner*)

Tugas utama dewan komisaris adalah menjalankan proses monitoring terhadap dewan direksi untuk memastikan kebijakan beserta implementasi yang dibuat agar tetap berada dalam koridor pencapaian tujuan perusahaan secara efektif efisien dan ekonomis. Tingkat pengawasan yang tinggi kepada manajemen perusahaan akan berdampak pada tindakan lebih konservatif dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga diharapkan akan timbul transparansi di dalam menjalankan operasional perusahaan.

b. Dewan Direksi

Tanggung jawab utama dewan direksi adalah menjalankan *day to day operation* perusahaan dan bersifat kolegal. Ukuran dewan direksi yang semakin besar diyakini mampu meningkatkan kinerja perusahaan dengan tetap menjunjung tinggi pencapaian *good corporate governance*.

c. Komite Audit

Komite audit merupakan organ pendukung dewan komisaris yang bertugas membantu fungsi monitoring terhadap dewan direksi agar tetap berada dalam koridor pencapaian tujuan perusahaan, sesuai rencana strategis yang ditetapkan dalam RUPS. Dalam menjalankan fungsinya komite audit harus memastikan kewajaran laporan keuangan, kepatuhan terhadap struktur pengendalian intern, pengawasan terhadap kualitas proses dan hasil audit internal maupun eksternal, dan monitoring terhadap sejauh mana temuan audit telah ditindaklanjuti oleh manajemen (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Penelitian ini lebih menitikberatkan sejauh mana efektifitas peran komite audit menggunakan lima elemen penting komite audit yaitu kompetensi, Jumlah rapat, ukuran, durasi masa jabatan dan *directorship* mempengaruhi pengungkapan etika.

Pengungkapan Sukarela

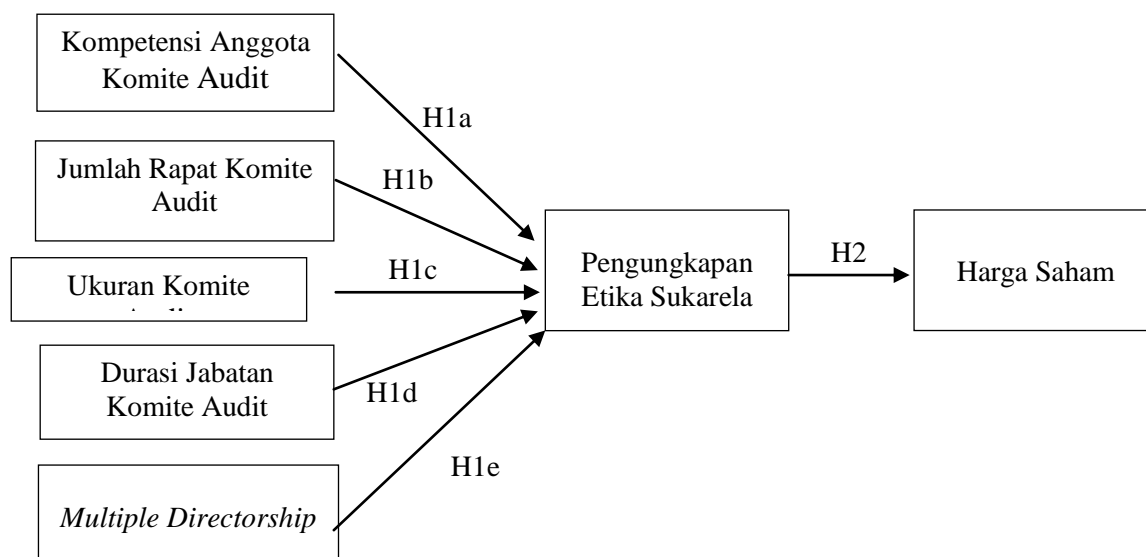
Pengungkapan sukarela didefinisikan sebagai pengungkapan yang dilakukan di luar aturan wajib pengungkapan yang diharuskan oleh regulator (Qu, Cooper, Wise dan Leung, 2012). Bentuk pengungkapan sukarela umumnya berupa Informasi strategis, informasi bersifat moneter dan non-moneter (Eng dan Mak 2003). Pemilihan jenis informasi relevan dan dibutuhkan *stakeholder* dan bermanfaat bagi proses keputusan bisnis ditentukan secara independen oleh perusahaan (Fitriana dan Andri, 2014). Pengungkapan etika dalam penelitian ini diukur dengan instrument berupa 18 (delapan belas) aspek pengungkapan etika (Persons ,2009)

Harga Saham

Harga saham suatu perusahaan akan terbentuk berdasarkan aktivitas permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar saham tersebut. Kinerja suatu perusahaan diyakini merupakan penentu harga saham. Jika kinerja perusahaan meningkat otomatis akan meningkatkan kinerja harga saham . Begitu pula sebaliknya, pada saat kinerja perusahaan mengalami penurunan maka harga saham cenderung akan mengalami kontraksi penurunan. Kondisi harga saham perusahaan yang tinggi akan memberikan keuntungan baik bagi investor maupun bagi perusahaan itu sendiri. Keuntungan lain tingginya harga saham adalah citra baik yang terbentuk dan berdampak pada kemudahan menarik dana dari pihak luar perusahaan. Pengukuran harga saham dalam penelitian ini menggunakan harga saham penutupannya.

Bagan Alir Penelitian

Berdasarkan latar belakang akan di sajikan bagan kerangka penelitian dari sebagai berikut :



Hipotesis

- H1a : Kompetensi komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela.
- H1b : Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela.
- H1c : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela.
- H1d : Durasi jabatan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela.
- H1e : *Multiple directorship* komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela.
- H2 : Pengungkapan etika sukarela berpengaruh terhadap harga saham.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi berupa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018. Sampel dipilih dengan purposive sampling, yaitu sampel diperoleh berdasarkan kualifikasi yang telah dirumuskan oleh peneliti. Adapun kualifikasi yang dijadikan dasar dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus tergabung dalam indeks KOMPAS100 untuk bulan edar Juli 2019. Indeks KOMPAS100 dipilih dengan alasan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik dengan memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang besar.
- b. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2018.
- c. Perusahaan dengan data lengkap sesuai kualifikasi yang dimaksud dalam penelitian.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dalam penelitian ini adalah, variabel independen (bebas) yaitu karakteristik komite audit (X1), variabel dependen yaitu harga saham (Y1), serta variabel mediasi yaitu pengungkapan etika sukarela. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang didapat oleh peneliti dari sumber yang telah tersaji. Variabel dalam penelitian ini dinukil dan tersaji dalam laporan tahunan, pelaporan keuangan dan kinerja perusahaan yang diperoleh melalui website IDX (www.IDX.co.id).

Teknik Analisis

Data yang diperoleh, terlebih dahulu harus dilakukan pengolahan kemudian dianalisis kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu supaya peneliti dapat menarik kesimpulan secara akurat (Agustina, 2018, h.41). Agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik maka dibutuhkan alat analisis yang akurat, sinkron dengan model penelitian dan variabel yang akan diteliti agar tepat dalam melakukan interpretasi. Seiring kerangka penelitian, regresi berganda akan digunakan dengan alat bantu SPSS.

1. Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai profil data sampel. Statistik deskriptif juga bermanfaat untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Adapun statistik deskriptif yang akan dipakai adalah *mean*, *standard deviation*, *maximal* dan *minimal*.

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik akan digunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk menghitung persamaan regresi, dengan mempertimbangkan beberapa asumsi yang harus dilengkapi terlebih dahulu agar persamaan regresi tersebut dapat diyakini keabsahannya dan dapat digunakan dalam penelitian.

Untuk pengujian lebih lanjut maka analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara karakteristik komite audit, pengungkapan etika sukarela dan harga saham.

Hasil

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-Rata
AUDAC	94	0,20	1	0,528
AUDNUM	94	4	38	9,63
AUDSCO	94	3	6	3,39
AUDTEN	94	1	5	3,664
DIRSHIP	94	0	5,33	0,697
ETIKA	94	0	16	11,78
HARGA SAHAM	94	82	76.700	4.624,4

Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa variabel kompetensi komite audit (AUDAC) bernilai minimum 0,20 dan nilai maksimum 1. Nilai 1 mengandung arti bahwa seluruh anggota komite audit memiliki kompetensi dan latar belakang akuntansi serta keuangan, sedangkan nilai minimum 0,20 memiliki makna bahwa tidak lebih dari 20% anggota komite audit yang memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan. Angka 0,528 menunjukkan bahwa terdapat 52.8 % dari total anggota yang dijadikan sampel rata-rata memiliki kemampuan akuntansi dan keuangan.

Jumlah rapat komite audit (AUDNUM) mempunyai skor maksimum 38, hal ini bermakna komite audit mengadakan pertemuan sejumlah 38 kali dalam satu tahun. Sementara skor minimum adalah 4 yang menggambarkan bahwa komite hanya mengadakan pertemuan sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Sementara secara Rata-rata jumlah pertemuan komite audit setiap perusahaan adalah sebanyak 10 kali dalam setahun (pembulatan dari 9,63).

Variabel scope komite audit (AUDSCO) menunjukkan skor minimum 3 dan skor maksimum sebesar 6. Skor 3 menggambarkan bahwa jumlah komite audit paling rendah di perusahaan yang dijadikan sampel beranggotakan 3 orang. Skor maksimum sebesar 6 menunjukkan jumlah komite audit terbanyak di perusahaan yang dijadikan sampel beranggotakan 6 orang. Sedang Rata-rata adalah 3 orang, tergambar dari nilai rata-rata sebesar 3,39 dan dibulatkan ke bawah.

Variabel durasi jabatan komite audit (AUDTEN) mempunyai skor terendah 1 dan skor nilai tertinggi sebesar 5. Skor 1 mengandung arti bahwa durasi jabatan terpendek adalah setahun. Sedangkan skor 5 berarti bahwa durasi jabatan komite audit terpanjang adalah 5 tahun. Sementara secara rata rata durasi jabatan 4 tahun, tergambar dari skor rata-rata sebesar 3,664 dan dibulatkan ke atas menjadi 4.

Variabel komite audit dengan *multiple directorship* (DIRSHIP) mempunyai skor terendah 0 dan tertinggi 5,33. Hal ini menggambarkan anggota komite audit mempunyai *directorship* tertinggi 5 *directorship* dan skor bawah 0 berarti anggota komite audit tidak melakukan rangkap jabatan perusahaan lain. Ditinjau dari rata-rata nya komite audit rangkap jabatan adalah 0 sampai 1 jabatan di perusahaan lain.

Variabel pengungkapan etika sukarela (ETIKA) memiliki skor terendah 0 dan skor tertinggi 16. Skor 0 memiliki arti bahwa perusahaan tidak melakukan pengungkapan etika sukarela. Sedangkan skor maksimum 16 menunjukkan perusahaan mengungkapkan 16 point pengungkapan etika. Rata-rata perusahaan mengungkapkan 11 sampai 12 point pengungkapan etika perusahaannya.

Variabel harga saham pada penelitian ini memiliki skor minimal 82 dan skor maksimal sebesar 76.700. Hal ini menggambarkan skor paling rendah harga saham perusahaan yang dijadikan sampel adalah Rp82. Sedangkan skor paling tinggi dari harga saham adalah seharga Rp76.700. Semenatar rata-rata harga saham adalah seharga Rp4.624

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

	B	T	Sig	Keterangan
(Constant)	14,808	8,567	0,000	
AUDAC	-1,309	-0,847	0,401	Tidak berpengaruh
AUDNUM	0,115	2,307	0,025	Berpengaruh positif
AUDSCO	1,211	1,356	0,177	Tidak berpengaruh
AUDTEN	-0,291	-1,015	0,315	Tidak berpengaruh
DIRSHIP	-1,716	-2,356	0,022	Berpengaruh negatif
ETIKA	0,491	2,207	0,031	Berpengaruh positif

Sumber : Output SPSS, data sekunder yang diolah 2020

Tingkat signifikansi 0,05 (5%)

Pengaruh Keahlian Komite Audit Terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis 1a menyebutkan bahwa kompetensi komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Berdasarkan pengujian, nilai signifikansinya sebesar 0,401 dimana angka tersebut berada pada level lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang diputuskan pada penelitian ini ($0,401 > 0,05$). Hasil pengujian dapat dijadikan dasar mengambil kesimpulan bahwa hipotesis I pada penelitian ini tidak diterima. Sehingga dalam penelitian ini kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela dari perusahaan tersebut.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Othman et al (2004) yang menyebutkan bahwa kompetensi anggota komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Implikasi hasil diatas memberikan gambaran bahwa komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan belum mampu mendorong peningkatan pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Hal ini karena adanya keengganan manajemen perusahaan menerima saran dari anggota komite jika saran tersebut diyakini justru akan berdampak buruk terhadap pengambilan keputusan para investor.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis 1b dalam penelitian ini menyebutkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan skor signifikansi sebesar 0,025, skor tersebut berada pada level kurang dari level signifikansi yang telah dinyatakan pada penelitian ini sebesar 0,05 ($0,025 < 0,05$). Nilai t pada pengujian menunjukkan angka 2,307 yang memiliki makna bahwa pengaruh tersebut memiliki arah positif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah hipotesis 1b penelitian ini diterima. Dengan kata jumlah rapat anggota komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Hasil ini mengisyaratkan bahwa semakin intens frekuensi jumlah rapat yang diadakan semakin tinggi juga kecenderungan perusahaan melakukan pengungkapan etika sukarela.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Raghunandan et al (2001) yang membuktikan bahwa anggota komite audit dengan frekuensi rapat yang lebih berpotensi mendapatkan informasi yang

lebih banyak , akurat serta terbaru yang dapat membantu tugas tugas kekomitean mereka . Penelitian lain yang tidak berbeda hasilnya adalah Pearson (2009) juga membuktikan tingginya intensitas rapat komite audit berdampak pada peningkatan pengungkapan etika sukarelanya.

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis 1c menyebutkan bahwa scope komite audit mempunyai pengaruh pada pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Hasil pengujian memberikan skor signifikansi sebesar 0,177 yang berarti berada di atas tingkat signifikansi yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu 0,05 ($0,177 > 0,05$). Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian ini adalah penolakan terhadap hipotesis 1c. Implikasi dari penelitian ini adalah scope komite audit tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan etika sukarela dari perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan Lin et al (2008) yang memperoleh hasil besarnya scope komite audit cenderung menyebabkan ketidaksepahaman dan menghambat kecepatan pengambilan keputusan. Hal demikian sering kali merupakan akibat dari terjadinya sumbatan komunikasi sehingga keputusan yang diambil cenderung kurang memadai. Konsekuensi dari penelitian ini adalah semakin besar ukuran komite audit belum memberikan garansi luasnya pengungkapan etika.

Pengaruh Masa Jabatan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis 1d pada menyebutkan bahwa durasi jabatan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela. Hasil pengujian menunjukkan skor signifikansi sebesar 0,315 berada di atas skor signifikansi yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu 0,05 ($0,315 > 0,05$). Hasil pengujian di atas memberikan sebuah konklusi bahwa hipotesis 1d ditolak.

Durasi jabatan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela dari perusahaan tersebut. Hasil Penelitian ini tidak berseberangan dengan Persons (2009) yang menyimpulkan tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara durasi jabatan komite audit dengan pengungkapan etika sukarela.

Pengaruh Anggota Komite Audit dengan Multiple Directorship Terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Hipotesis 1e menyebutkan bahwa anggota komite audit dengan multiple directorship berpengaruh terhadap pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Hasil pengujian berada pada skor signifikansi sebesar 0,022 atau berada di bawah level signifikansi yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu 0,05 ($0,022 < 0,05$). Nilai t pada hasil pengujian menunjukkan angka -2,356 yang memiliki makna bahwa pengaruh tersebut memiliki arah negatif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah hipotesis 1e penelitian ini diterima. Implikasi dari penelitian ini adalah anggota komite audit

dengan *multiple directorship* pada suatu perusahaan memiliki berpengaruh negatif dan signifikan pada pengungkapan etika sukarela dari perusahaan tersebut.

Hasil Penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Liu & Sun (2010) yang berhasil membuktikan bahwa anggota komite audit yang memiliki *multiple directorship* atau jabatan terlalu banyak memiliki kecenderungan tidak memiliki waktu banyak untuk melakukan monitoring pada manajemen, dampak nyata yang terjadi adalah tidak efektifnya fungsi monitoring.

Pengaruh Pengungkapan Etika Sukarela Terhadap Harga Saham Perusahaan

Hipotesis 2 pada penelitian ini menyebutkan terdapat pengaruh pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan terhadap harga saham perusahaan tersebut. Skor hasil pengujian sebesar 0,031 berada pada level lebih rendah dibanding tingkat signifikansi yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu 0,05 ($0,031 < 0,05$). Nilai t pada hasil pengujian menunjukkan angka 2,207 yang memiliki makna bahwa pengaruh tersebut memiliki arah positif dan semakin tinggi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan maka harga saham perusahaan akan meningkat. Implikasi dari hasil pengujian adalah hipotesis 2 pada penelitian ini diterima. Pengungkapan etika sukarela pada suatu perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dari perusahaan tersebut.

Hasil ini tidak berbeda dengan penelitian Feng & John (2007) yang membuktikan bahwa terdapat reaksi positif pada pengungkapan terhadap harga saham. Menurut penelitian tersebut, investor melihat bahwa pengungkapan merupakan suatu kabar baik yang dapat dipercaya oleh publik dan menjadi salah satu alasan untuk tidak memindahkan dananya pada perusahaan lain. Tingkat informasi yang tinggi menjadikan investor tertarik dan menaruh kepercayaan untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut .

Simpulan Dan Saran

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dampak yang diberikan oleh karakter yang melekat pada komite audit terdiri dari kompetensi, jumlah pertemuan , ukuran, durasi jabatan dan juga komite audit dengan *multiple directorship* terhadap pengungkapan etika sukarela serta implikasinya terhadap harga saham. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam indeks KOMPAS100 yang edar Juli 2019. Karakteristik perusahaan yang tergabung dalam indeks KOMPAS100 adalah perusahaan yang dengan tingkat likuiditas dan tingkat kapitalisasi pasar yang besar. Kesimpulan yang diambil berdasarkan berbagai tahap penelitian yang sudah dilakukan seperti kegiatan mengumpulkan, mengolah , melakukan analisa serta interepetasi data disajikan sebagai berikut.

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi anggota komite audit memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Sementara jumlah pertemuan komite audit menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela perusahaan. Untuk scope komite audit terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. Durasi jabatan dari anggota komite audit memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Sedangkan untuk anggota komite audit dengan *multiple directorship* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela suatu perusahaan. Sedangkan variabel pengungkapan etika sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dari perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pertama, penggunaan sampel yang mencakup durasi waktu hanya 1 periode pelaporan, kedua penggunaan index Persons (2009) yang sudah 10 tahun tanpa ada pengembangan. Selain itu, variabel pengungkapan etika sukarela dapat dihubungkan dengan variabel kompetensi, jumlah rapat, scope, durasi jabatan dan anggota komite audit dengan *multiple directorship* hanya dengan prosentase sebesar 9,1%. Sehingga terdapat banyak variabel lain tersisa yang kemungkinan berpengaruh dan tidak termasuk model regresi ini. Sementara variabel harga saham tercatat dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan etika sukarela senilai 4%, sementara tersisa variabel lain yang kemungkinan dapat menjelaskan di luar model regresi.

Daftar Pustaka

- Abbott, L. J. & Parker, S. (2000). *Audit committee characteristics and auditor selection*. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 19 (Fall), 47-66.
- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F. and Raghunandan, K. (2003). *The association between audit committee characteristics and audit fees*. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 22, 17-32.
- Agustina, M. A. (2018). *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan dan Kepuasan Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan IAIN Surakarta)*. 121.
- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M. and Yao, L. (2009). *Corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian Listed Firms*. *Journal Application Management Accounting*, 7 (1), 1-20.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. and Lapedes, P. D. (2000). *Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms*. *Accounting Horizons*, 14, 14-21.
- Bédard, J., Chtourou, S. M., & Courteau, L. (2004). *The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management*. *Auditing*.
- Carcello, J. V. and Neal, T. L. (2003). *Audit committee characteristics and auditor dismissals following new going-concern reports*. *The Accounting Review* 78, 95-118.

- Core, J., Holthausen, R., and Larcker, D. (1999). *Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance*. *Journal of Financial Economics*, 51, 371-406.
- Dalton, D.R., Daily, C.M., Johnson, J.L. & Ellstrand, A.E. (1999). *Number of directors and financial performance: A meta-analysis*. *Academy of Management Journal*, 42, 674-86.
- Ebert, M. & Schneider, G. (2016). *Is there more voluntary disclosure if investors are better informed?* *Workshop on accounting and regulation in Siena*. 1-26.
- Eng, L. L., and Mak, Y. T. (2003). *Corporate governance and voluntary disclosure*. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325-345.
- Feng, G., & John, Q. (2007). *The credibility of voluntary disclosure and insider stock transactions*. *Journal of accounting research*, 45(4): 771-783.
- Fich, E. M. and Shivdasani, A. (2006). *Are busy boards effective monitors?* *Journal of Finance* 61, 689-724.
- Fitriana N. L. dan Andri P. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Annual Report*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 No. 3: 1.
- Forker, J. J. (1992). *Corporate governance and disclosure quality*. *Accounting and Business Research*, 22, 111-124.
- Friedman, T. L. (2008). *The great unraveling*. *New York Times* OP-ED Columnist, December 16.
- Haggard, K., Martin, X., & Pereira, R. (2008). *Does voluntary disclosure improve stock price informativeness?* *Financial management*, 747-768, Winter.
- Hayek, C. and Hayek, M. (2012). *Audit Committee characteristics and moral awareness of financial fraudulent reporting: The moderating role of dispositional integrity*.
- Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. (2002). *Teori akunting, ed. kelima*. Batam: Interaksara.
- Hussain Alkdai, H. K. (2012). *Audit committee characteristics and earnings management Malaysian Shariah-compliant companies*. *Business and Management Review*, 2(2), 52-61.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). *The Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial and Economics*, 3: 305-360.
- Lefkowitz, J. (2006). *The constancy of ethics amidst the changing world of work*. *Human Resource Management Review*.
- Leone, M. (2010). *Ethics and the bottom line*. Diakses pada 15 November 2019 melalui <https://www.cfo.com/risk-compliance/2010/06/ethics-and-the-bottom-line/>.
- Lin, Z. J., Xiao, J. Z. and Tang, Q. (2008). *The roles, responsibilities and characteristics of audit committee in China*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(5), 721-751.
- Liu, G. and Sun, J. (2010). *Director tenure and independent audit committee effectiveness*. *International research journal of finance and economics*, 51, 176- 189.

- Muhammad, R., Shahimi, S., Yahya, Y. & Mahzan, N. (2009). *Disclosure quality on governance issues in annual reports of Malaysia PLCs*. *International business research*, 2 (4), 61-72.
- Othman, R., Ili, F. I., Siti, M. M. A. and Nooraslinda A. A. (2014). *Influence of audit committee characteristics on voluntary ethics disclosure*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Ojk.go.id, 1-21.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Ojk.go.id, 1-14.
- Persons, O. S. (2005). *Relation between the new corporate governance rules and the likelihood of financial statement fraud*. *Review of Accounting and Finance* 4 (2), 125-148.
- Persons, O. S. (2009). *Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms*. *International Journal of Disclosure and Governance*, 6 (4), 284-297.
- Persons, O. S. (2011). *Characteristics and financial performance of no ethics-code firms*. *Journal of academic and business ethics*, 1-14.
- Poluan, G. dan Paskah, I. N. (2015). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kondisi Financial Distress terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4 No. 1: 3.
- Purwati, A. S. (2006). *Pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang tercatat di BEJ*. Semarang: Universitas Diponegoro. (Thesis).
- Qu, W., Cooper, J. Wise, V. & Leung, P. (2012). *Voluntary disclosure in a changing regulatory environment – evidence from Chinese stock market*. *International Journal of Economics and Finance*, 4 (4), 30-43.
- Ragunandan, K., Read, W. J. and Rama, D. V. (2001). *Audit committee composition, gray directors and interaction with internal auditing*. *Accounting Horizons* (June), 105-118.
- Rahmat M. M., Takiah M. I. and Norman M. S. (2009). *Managerial Auditing Journal*, 24 (7), 624-638.
- Sembiring, H. (2012). *Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI*. *Jurnal mediasi*, 4(1): 68-77.
- Shivdasani, A., and Yermack, D. (1999). *CEO involvement in the selection of new board members: An empirical analysis*. *The Journal of Finance* 54, 1829-1853.
- Sullivan, J. D. and Shkolnikov, A. (2006). *Business ethics: The essential component of corporate governance*. Center for International Private Enterprise, 1-16.

- Syuhada, A., Yusnaini, & Meirawati, E. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan*. *Akuntabilitas*, 13(2), 141–154. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9593>
- Thoopsamut, W. and Jiakengkit, A. (2009). *Audit committee characteristics, audit firm size and quarterly earnings management in Thailand*, 8 (1), 3-12.
- Wardani, Puruwita. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14 No. 1: 4.
- Wijaya, R. E. (2009). *Keberadaan corporate governance dan kondisi financial distressed terhadap voluntary disclosure*. *Jurnal keuangan dan perbankan*, 13(3): 395-404.
- Wittmer, D. P. (2001). *Ethical Decision-making*. In T. L. Cooper (Ed.), *Handbook of Administrative Ethics*. New York: Marcel Dekker., 2, 481–507.
- Wulandari, Siswi. (2015). *Good corporate governance dalam perspektif etika bisnis*. *Journal Applied Business and Economics*, 1 No. 3.
- Xie, B., Davidson, W. N., & Dadalt, P. J. (2003). *Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee*. *Journal of Corporate Finance*.
- Yuen, D. C. Y., Liu, M., Zhang, X. & Lu, C. (2009). *A case study of voluntary disclosure by Chinese enterprises*. *Asian journal of finance and accounting*, 1 (2), 118-145.